

PERAN AGAMA DAN BUDAYA DALAM PEMERINTAHAN (Studi Kasus Kota Sukabumi)

Oleh: Yadi M. Erlangga

Pendahuluan

Dalam proses perjalanan sebuah bangsa, pasti akan selalu dihadapkan pada falsafah dasar serta tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa yang bersangkutan. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia, para *founding fathers* telah merumuskan falsafah serta dasar negara kedalam Pancasila dan tujuan negara yang semuanya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Falsafah negara sesungguhnya adalah suatu nilai-nilai dasar yang diyakini serta tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Bangsa Indonesia, nilai-nilai dasar tersebut seringkali bersumber dari agama. Dengan demikian sesungguhnya peran agama sangatlah sentral dalam menentukan arah kehidupan negara dan bangsa kita. Betapapun negara Indonesia bukanlah negara agama, namun tidaklah serta merta secara otomatis kita dapat mengkatagorikan negara kita sebagai negara sekuler. Dalam banyak hal, negara kita tidaklah terpisah secara diametral dengan agama. Bahkan agama seringkali memberikan inspirasi, memberi tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.

Bila kasus ini ditarik ke wilayah lokal yakni wilayah Kota Sukabumi, maknanya tetaplah sama. Sebagai suatu wilayah yang sebagian besar

penduduknya beragama Islam dengan tingkat pemahaman dan keyakinan terhadap agamanya cukup baik, maka peran agama dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan cukuplah sentral. Maka tidaklah berlebihan bila dilihat dari sudut ini masyarakat Kota Sukabumi sesungguhnya adalah masyarakat yang islami. Sementara itu bila ditinjau dari mayoritas bahasa yang digunakan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditradisikan serta pandangan hidup yang bersumber dari leluhur, sebagian besar masyarakat Kota Sukabumi mempunyai adat dan budaya sunda.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kota Sukabumi

Jumlah penduduk Kota Sukabumi menurut data pada tahun 2010 adalah sebesar 299.247 jiwa. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduknya adalah sekitar 6.234 jiwa per Km². Sebagai daerah perkotaan yang diarahkan pada pelayanan jasa perdagangan, maka sebagian besar penduduk Kota Sukabumi (43 %) bekerja di sektor jasa perdagangan. Sementara itu bila dilihat menurut agama, penduduk Kota Sukabumi sekitar 95% beragama Islam dengan kultur budaya yang melatarbelakanginya adalah kultur budaya dan adat sunda.

Keyakinan terhadap agama Islam serta kultur budaya dan adat sunda yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kota Sukabumi dengan sendirinya membentuk suatu watak dasar masyarakat yang bersifat islami dan *nyunda*.

Falsafah Budaya Sunda

Dalam konteks falsafah sunda, secara tersurat disimbolkan dalam lambang Kota Sukabumi yang memuat kujang (senjata pusaka luhur Bangsa Indonesia di Daerah Pasundan) dan motto *Reugreug pageuh repeh rapih*. Lambang kujang menggambarkan sikap keberanian, artinya masyarakat Kota Sukabumi mempunyai komitmen untuk tampil ke depan *makalangan* dalam upaya meraih kebenaran dan mencapai mimpi-mimpinya. Konsep keberanian ini tentunya meluruskan sifat dasar orang sunda yang sering digambarkan kurang percaya diri (inferior) dengan istilah yang cukup populer “mangga ti payun”. Padahal sesungguhnya ada sifat dasar lain dari orang sunda yang menggambarkan keberanian untuk tampil ke depan dengan istilah “halik ku aing”. Istilah terakhir inilah yang dipilih oleh masyarakat Kota Sukabumi untuk mewujudkan cita-cita hidupnya yang dilambangkan oleh senjata kujang.

Selanjutnya motto *reugreug pageuh repeh rapih*, merupakan filosofi orang sunda yang selalu menjalankan kehidupannya selaras dengan alam berikut simbol-simbol tak kasat mata yang menyertainya. Dalam konteks inilah masyarakat sunda dituntut untuk sensitif terhadap bahasa simbolik alam raya yang melingkupi kehidupannya, orang sunda haruslah *waskita*. Melalui motto *reugreug pageuh repeh rapih* masyarakat Kota Sukabumi berkehendak untuk mewujudkan kotanya yang tangguh, kukuh, aman tenteram dan bersatu.

Konsep dan Format Paradigma Surgawi

Dalam Bukunya *Pembangunan Masyarakat Masjid*, H.M. Shalahuiddin Sanusi menjelaskan bahwa Konsep Paradigma Surgawi itu adalah suatu format kehidupan masyarakat seperti layaknya di "surga". Secara konseptual kehidupan surgawi itu mempunyai dua dimensi yang dirumuskan dalam Al-Qur'an dengan sebuah kalimat yang amat singkat, yaitu: *Laa khaufun 'alaihim walaahum yahzanuun*, yakni suasana kehidupan masyarakat yang tidak mengenal rasa ketakutan dan keprihatinan, yang didasarkan kepada keimanan akan ke-esaan Allah (Tauhidullah) dan pengabdian, kebaktian serta ketaatan (ibadah) kepada-Nya.

Lebih rinci format paradigma surgawi itu meliputi dua dimensi: *Pertama*, dimensi kultural yang dirumuskan dalam kalimat "Laa khaufun 'alaihim, yakni suatu kehidupan masyarakat yang bersatu, aman, damai, tertib, bersih, sopan dan berakhlak mulia, sehingga setiap warganya memiliki rasa aman, damai dan tenteram. *Kedua*, dimensi sosial ekonomi yang dirumuskan dalam kalimat "*Walaahum yahzanuun*", yakni suatu kehidupan masyarakat yang adil dengan kemakmuran yang merata, sehingga setiap warganya merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan bathin.

Seperti halnya ketika Ir. Soekarno, Mr. Mohamad Yamin dan para *founding fathers* negeri ini merumuskan Pancasila yang digali dari akar bumi Indonesia, maka Konsep paradigma surgawi sesungguhnya merupakan suatu ikhtiar dari para alim ulama serta pemerintah Kota Sukabumi dalam menggali serta merumuskan landasan etik, kultur serta nilai-nilai religius yang dipahami dan diyakini oleh masyarakat Kota Sukabumi yang sebagian besar beragama Islam. Dalam kerangka

pemikiran seperti ini, maka Walikota/Wakil Walikota Sukabumi periode 2008-2013 merumuskannya kedalam suatu visi yaitu “*Dengan iman dan taqwa mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera*”. Visi ini memiliki pengakuan akan eksistensi dan peran agama sebagai pengendali sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat maupun sebagai landasan moral etika pemerintahan dalam merumuskan kebijakan pemerintah serta menjalankan program pembangunannya.

Dalam perjalanannya, proses perumusan visi ini adalah hasil konsultasi yang sangat intens dengan para alim ulama. Hal ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa dalam agama Islam terdapat dasar-dasar dan landasan yang mengatur peri kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Namun interpretasi yang komprehensif atas masalah-masalah tadi tentu saja menjadi otoritas para alim ulama beserta para intelektual muslim yang memang mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan yang relevan. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai *regulatif* (pengatur administrasi dan kebijakan publik) dan *eksekutif* (penyelenggara pemerintahan) atas dasar landasan etik dan moral yang disusun oleh para alim ulama.

Aktualisasi Konsep Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi

Pada hakekatnya suatu pemerintahan itu dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya.

Pemerintahan yang demokratis yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat serta diselenggarakan demi kesejahteraan rakyat. Artinya pemerintahan demokratis merupakan suatu pemerintahan dimana masyarakatnya memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi, masyarakatlah sesungguhnya yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengontrol jalannya sebuah pemerintahan.

Konsep paradigma surgawi sesungguhnya adalah konsep normatif yang diharapkan akan menjadi nilai dasar dalam merumuskan kebijakan publik serta mengimplementasikan program-program pembangunan di Kota Sukabumi. Sebagai sebuah nilai dasar (falsafah) maka gerak langkah pembangunan diarahkan dan harus selaras dengan konsep paradigma surgawi.

Untuk mencapai proses ini maka strategi dasar yang dianggap efektif adalah dengan cara mengembangkan **Pemerintahan yang amanah** dan **kepemimpinan visioner**. Pemerintahan yang amanah, sebagai sebuah Visi Walikota Sukabumi periode 2008-2013 mengandung makna sebagai pemerintahan yang dapat dipercaya. Konsep amanah memiliki pengertian setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk kepada amanah sebagai nilai dasarnya (Gazalba: 1962). Amanah juga bisa dipakai sebagai prinsip kepemimpinan. Dalam tarikh Nabi Muhammad SAW antara lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai empat ciri kepemimpinan yakni: *sidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya/accountable) dan *tabligh* (komunikatif). Dari uraian ini maka amanah sesungguhnya dapat

dijadikan landasan yang sangat esensi dalam kehidupan pemerintahan.

Dengan demikian pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab pada masyarakatnya. Pada tataran implementatif, diharapkan seluruh unsur pimpinan, aparat, lembaga sosial, organisasi politik dan masyarakat senantiasa dapat mengamalkan nilai-nilai amanah dalam kehidupannya.

Kepemimpinan visioner, yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang efektif yang selalu memperbaharui atau menyesuaikan visi organisasi yang dipimpinnya agar dapat diwujudkan, mengkomunikasikan dan berusaha memperoleh dukungan partisipasi semua pihak (Burt Nanus, 1992).

Visi yang digulirkan ini, pada hakikatnya merupakan cara pandang dalam pencapaian tujuan nasional dengan lebih menekankan kepada basis nilai-nilai religius, dimana bagi Umat Islam “Paradigma Surgawi” dirumuskan dalam kalimat “*laa khaufun’alaihima walaahum yahzanun*”, meliputi dimensi kultural dan dimensi sosial ekonomi seperti yang telah saya kemukakan di muka.

Pada akhirnya, keseluruhan dari kebijakan pemerintah dan program pembangunan yang telah, sedang dan akan digulirkan oleh Pemerintah Daerah harus senantiasa dilandasi dan memuara pada nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kota Sukabumi yakni suatu masyarakat yang menginginkan dan hendak mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang berparadigma surgawi.

Penutup

Paradigma surgawi dalam satu sisi adalah suatu harapan (*dassein*), sementara realitas masyarakat kekinian di sisi lain adalah sebuah *das sollen*. Hidup itu sendiri adalah suatu pertarungan antara *dassein* dan *dassolen*. Keberhasilan sebuah kepemimpinan (khalifah) terletak pada adanya sinkronisasi antara *dassein* dan *dassolen* pada batas yang paling mendekati. Pada tahap ini metode serta sumber daya (*resources*) sangatlah menentukan tercapainya perwujudan masyarakat berparadigma surgawi (*dassein*) di Kota Sukabumi. Tentu saja secara riil dan objektif dalam kondisi sekarang format masyarakat berparadigma surgawi serta masyarakat islami belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti globalisasi dan arus informasi yang demikian deras yang mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat Kota sukabumi secara umum. Pada fase seperti ini maka sangat rentan akan terjadinya pegeseran nilai dan perubahan norma-norma yang sebelumnya dijadikan patokan dan ukuran oleh masyarakat.

Format pemerintahan dan masyarakat yang berparadigma surgawi itu sendiri adalah suatu upaya meneguhkan kembali atas prinsip dan nilai dasar serta pandangan yang selama ini dianut oleh masyarakat yang bersumber dari agama dan adat budaya. Bahwa format ini telah berhasil dilaksanakan tentunya sejarahlah yang akan membuktikannya. Namun demikian menjadikan agama serta adat budaya sebagai landasan etik dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentunya harus terus dilestarikan.